

Peran Kemitraan Multi-Pihak Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Kota Malang Sebagai Implementasi SDGs 17

Najuwa Safira Aulia Putri¹, Ratu Syifa Khairani², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴

25040674333@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674330@mhs.unesa.ac.id²,

indahprabawati@unesa.ac.id³, firresuprpto@unesa.ac.id⁴

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Penelitian ini membahas peran tata kelola kolaboratif dalam pengembangan pariwisata pedesaan di Agrowisata Bumiaji, Kota Batu, dengan fokus pada sinergi antar pemangku kepentingan serta dampaknya terhadap pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan multi-pihak yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan komunitas memiliki peran penting dalam menciptakan pengelolaan pariwisata yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Keberhasilan kolaborasi ini didukung oleh adanya partisipasi aktif, transparansi, dan kepercayaan antar pihak, sehingga pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan serta mendukung pencapaian SDGs 17. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi antar stakeholder, keterbatasan sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, kapasitas SDM, serta partisipasi masyarakat agar kemitraan dapat berjalan lebih optimal dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Kata Kunci: Tata Kelola Kolaboratif, Pariwisata Pedesaan, Kemitraan Multipihak, Keberlanjutan, SDGs 17

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestarian lingkungan. Dengan keunggulan sektor pendidikan, budaya, kuliner, serta kedekatan dengan destinasi wisata alam, Kota Malang.

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor ini, pemerintah telah mendorong berbagai program pengembangan, seperti homestay desa wisata, digital tourism, dan peningkatan aksesibilitas. Program-program tersebut bertujuan untuk memperkuat daya tarik destinasi wisata sekaligus memberdayakan masyarakat lokal agar dapat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi pariwisata secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu destinasi unggulan di Jawa Timur, Kota Malang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Keunggulan sektor pendidikan, budaya, kuliner, serta kedekatan dengan destinasi wisata alam menjadikan Kota Malang sebagai kawasan yang terus mengalami pertumbuhan wisata. Namun, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan tidak dapat hanya bergantung pada peran pemerintah. Diperlukan kemitraan multi-pihak yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan komunitas untuk menciptakan tata kelola pariwisata yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Konsep kemitraan multi-pihak ini sejalan dengan tujuan pembangunan global yang tertuang dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan

ke-17 mengenai Partnerships for the Goals. SDGs 17 menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai strategi untuk memperkuat kapasitas pembangunan, inovasi, dan keberlanjutan. Dalam konteks pariwisata, implementasi SDGs 17 diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah,

sektor swasta, dan masyarakat guna menciptakan ekosistem pariwisata yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis peran kemitraan multi-pihak dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Malang sebagai bentuk implementasi SDGs 17. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kolaborasi antar pemangku kepentingan, mengevaluasi efektivitas kemitraan dalam pengelolaan pariwisata, serta merumuskan rekomendasi strategi pengembangan yang dapat mendukung keberlanjutan sektor pariwisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip pembangunan yang diusung oleh United Nations.

KERANGKA TEORI

1. Teori Kemitraan Multi-Pihak (Multi-Stakeholder Partnership)

Teori ini menjelaskan bahwa pembangunan, khususnya sektor pariwisata, tidak dapat dilakukan secara tunggal oleh pemerintah. Kemitraan multi-pihak melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan komunitas untuk menciptakan sinergi sumber daya dan pengetahuan. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan pariwisata, memperkuat daya saing destinasi, serta memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Indikator kemitraan multi-pihak (relevan dengan teori Jos Edward Matherhord Asnania):

- Adanya partisipasi aktif pemangku kepentingan.
- Pembagian peran yang jelas antar pihak.
- Komunikasi dan koordinasi yang efektif.
- Kepercayaan dan komitmen dalam kolaborasi.
- Hasil kemitraan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Teori ini mendukung penelitian karena pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Malang memerlukan keterlibatan berbagai pihak agar pengelolaan wisata lebih inklusif dan berkelanjutan.

2. Teori Collaborative Governance

Collaborative governance menjelaskan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dalam model ini, pemerintah tidak bertindak secara hierarkis, tetapi sebagai fasilitator yang mendorong kolaborasi antar sektor.

Indikator collaborative governance:

- Keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
- Pengambilan keputusan yang berbasis konsensus.
- Transparansi dan akuntabilitas dalam proses kolaborasi.
- Adanya mekanisme evaluasi dan umpan balik.

Dalam konteks pariwisata, collaborative governance penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengembangan wisata mempertimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

3. Teori Formulasi Kebijakan

Teori formulasi kebijakan menjelaskan proses penyusunan kebijakan publik yang melibatkan identifikasi masalah, penentuan alternatif solusi, dan pemilihan kebijakan yang paling efektif. Dalam pengembangan pariwisata, kebijakan yang baik harus berbasis pada kebutuhan masyarakat dan kondisi lokal agar implementasinya berjalan optimal.

Indikator formulasi kebijakan:

- Analisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi sektor pariwisata.
- Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan.
- Kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan.
- Evaluasi kebijakan untuk perbaikan berkelanjutan.

Teori ini relevan karena keberhasilan pengembangan pariwisata di Kota Malang bergantung pada kebijakan yang mendukung kolaborasi dan keberlanjutan sektor wisata.

4. Teori Pariwisata Berkelanjutan

Teori pariwisata berkelanjutan menekankan bahwa pengembangan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pariwisata tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya dan nilai budaya lokal.

Indikator pariwisata berkelanjutan:

- Pelestarian lingkungan dan budaya.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
- Pengelolaan wisata yang bertanggung jawab.
- Pengurangan dampak negatif aktivitas wisata.

Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan global dalam agenda Sustainable Development Goals yang digagas oleh United Nations, khususnya SDGs 17 mengenai kemitraan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

5. Integrasi Teori (Kerangka Konseptual)

Penelitian ini mengintegrasikan teori-teori tersebut dalam kerangka berikut:

- Kemitraan multi-pihak sebagai dasar kolaborasi.
- Collaborative governance sebagai mekanisme pengelolaan kolaborasi.
- Formulasi kebijakan sebagai landasan regulasi dan pengambilan keputusan.
- Pariwisata berkelanjutan sebagai tujuan akhir pengembangan sektor wisata.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menganalisis peran kemitraan multi-pihak dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Malang, serta memberikan rekomendasi strategi pengelolaan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian teori melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena kemitraan multi-pihak dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan berdasarkan data sekunder yang bersumber dari literatur, artikel ilmiah, jurnal, buku, dan dokumen kebijakan. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai perspektif dan teori yang relevan tanpa melakukan pengumpulan data lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep

kemitraan multi-pihak dalam pengembangan pariwisata dan menganalisisnya berdasarkan teori tata kelola kolaboratif, formulasi kebijakan, serta pariwisata berkelanjutan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan dari literatur dengan konteks pengembangan pariwisata di Kota Malang serta implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs 17 mengenai kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran kolaborasi multi-pihak dalam menciptakan tata kelola pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.

Sumber Data

Data penelitian bersumber dari data sekunder, meliputi:

1. Jurnal ilmiah dan artikel penelitian: Digunakan untuk memperoleh teori dan temuan empiris terkait kemitraan multi-pihak, tata kelola pariwisata, dan pembangunan berkelanjutan.
2. Sumber digital dan publikasi kredibel: Digunakan untuk memperkaya analisis dan memastikan penelitian didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Studi literatur: Mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan tema penelitian.
2. Analisis literatur: Menyaring dan mengelompokkan informasi berdasarkan tema penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu teknik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari literatur yang dikaji. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Reduksi data: memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Kategorisasi data: mengelompokkan data berdasarkan tema seperti kemitraan, pariwisata berkelanjutan, dan tata kelola kolaboratif.
3. Interpretasi data: menghubungkan temuan literatur dengan teori dan konsep yang digunakan.
4. Penarikan kesimpulan: merumuskan temuan yang menjawab tujuan penelitian.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis peran kemitraan multi-pihak dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis peran kemitraan multi-pihak dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kemitraan Multi-Pihak dalam Pengembangan Pariwisata

Berdasarkan hasil kajian dari berbagai literatur, kemitraan multi-pihak merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan beberapa aktor seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Masing-masing pihak memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan, sektor swasta sebagai penggerak ekonomi, dan masyarakat sebagai pelaku utama di lapangan.

Kemitraan ini penting dalam pengembangan pariwisata karena dapat menyatukan berbagai kepentingan agar tujuan pembangunan pariwisata bisa tercapai secara bersama-sama dan berkelanjutan.

2. Peran Tata Kelola Kolaboratif

Dari hasil analisis, tata kelola kolaboratif menjadi faktor penting dalam keberhasilan kemitraan. Tata kelola ini menekankan pada kerja sama antar pihak yang didasari oleh partisipasi, transparansi, dan kepercayaan.

Dengan adanya kolaborasi yang baik, hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi lebih terarah. Hal ini juga membantu dalam mengurangi konflik serta meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pariwisata.

3. Implementasi di Kota Malang

Berdasarkan literatur yang dikaji, Kota Malang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata berbasis kemitraan. Beberapa bentuk kerja sama yang terlihat antara lain:

1. Kerja sama pemerintah dengan pelaku usaha
2. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata
3. Peran komunitas dalam promosi pariwisata

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya koordinasi antar pihak, keterbatasan sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat yang belum merata.

4. Keterkaitan dengan Pariwisata Berkelanjutan

Kemitraan multi-pihak berperan dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Hal ini terlihat dari dampak yang dihasilkan, yaitu:

1. Dari segi ekonomi, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Dari segi sosial, dapat menjaga budaya lokal
3. Dari segi lingkungan, mendorong pengelolaan yang lebih ramah lingkungan

Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan.

5. Kesesuaian dengan SDGs 17

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan multi-pihak sesuai dengan prinsip SDGs 17, yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan. Kerja sama antar sektor menjadi kunci dalam mencapai pembangunan yang inklusif.

Kemitraan ini membantu dalam:

1. Mengintegrasikan kebijakan
2. Meningkatkan kapasitas lembaga
3. Mempermudah akses sumber daya

Namun, dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak agar kerja sama dapat berjalan dengan optimal.

6. Analisis dan Implikasi

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kemitraan multi-pihak merupakan strategi yang cukup efektif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Akan tetapi, keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas kerja sama antar pihak.

Oleh karena itu, diperlukan:

1. Penguatan koordinasi antar stakeholder
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Peningkatan partisipasi masyarakat

KESIMPULAN

Kemitraan multi-pihak memiliki peran penting dalam menciptakan pengelolaan pariwisata yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan adanya kerja sama yang baik, pengembangan pariwisata dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta tetap menjaga lingkungan dan budaya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemitraan multi-pihak memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Malang. Kemitraan ini melibatkan berbagai aktor seperti pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan komunitas yang saling bekerja sama sesuai dengan perannya masing-masing.

Keberhasilan kemitraan tersebut sangat dipengaruhi oleh penerapan tata kelola kolaboratif, seperti adanya partisipasi aktif, transparansi, serta kepercayaan antar pihak. Dengan adanya kolaborasi yang baik, pengelolaan pariwisata dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

Selain itu, kemitraan multi-pihak juga berkontribusi dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan tujuan United Nations dalam Sustainable Development Goals, khususnya SDGs 17 yang menekankan pentingnya kemitraan dalam mencapai pembangunan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi antar stakeholder, keterbatasan sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan agar kemitraan yang dilakukan bisa lebih optimal.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder

Pemerintah dan pihak terkait perlu memperkuat komunikasi dan koordinasi agar kerja sama dapat berjalan lebih efektif dan tidak terpisah-pisah.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Perlu adanya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat dan pelaku pariwisata agar lebih siap dalam mengelola sektor pariwisata.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pengembangan pariwisata, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

4. Menyusun kebijakan yang mendukung kolaborasi

Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendorong kerja sama antar berbagai pihak agar kemitraan dapat berjalan secara berkelanjutan.

5. Mengembangkan pariwisata berbasis keberlanjutan

Pengembangan pariwisata harus tetap memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

6. Mengoptimalkan implementasi SDGs 17

Semua pihak perlu memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan kemitraan sebagai strategi utama dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- (Studi Perencanaan Desa Wisata Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu) *Jurnal Pariwisata Pesona*, 18(1), 1-21.
- Administrative Sciences (IJMAS)*, 4(07), 34-39.
- Anik, Sri., & Arifuddin. (2003). Analisis Pengaruh Komitmen Organisasi dan Keterlibatan Kerja Terhadap Hubungan antara Etika Kerja Islam
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice.
- Arya, Bindu & Salk, Jane E. (2006). Cross-Sector Alliance Learning and Effectiveness of Voluntary Codes of Corporate Social Responsibility, *Business Ethics Quarterly*, Vol. 16(2), p. 211-234.
- Bappelitbangda Kota Batu. (2018). RPJMD Kota Batu Tahun 2017-2022. Batu: Bappelitbangda.

- Batu: Badan Pusat Statistik Kota Batu.
Bidang Otomotif di Kota Yogyakarta). Disertasi, UPI, Bandung.
BPS Kota Batu. (2018). Kota Batu Dalam Angka 2018.
BPS Kota Batu. (2018). Publikasi Direktori Hotel dan Jasa Akomodasi Lainnya di Kota Batu Tahun 2018. Batu: Badan Pusat Statistik Kota Batu.
dengan Sikap Perubahan Organisasi. *JAAI*, 7(2), 159-182.
Development In Ghana: A Study Of Its Prospects And Challenges At Adjeikrom Cocoa Tour
Edwards III, Goerge C. (1980). Implementating Public
Eshun, G., & Tettey, C. (2014). Agrotourism
Facility. *Bulletin of Geography - Socio-economic Series*, 25, 81-99.
*International Journal of Management and
Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, 543-571.
Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi Strategis Aministrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu (edisi ketiga).
Kirana, C.A.D. (2017). Implementation of Tourism Destination Development Program in Batu.
Meningkatkan Mutu SMK (Studi Pada SMK Kelompok Teknologi
Policy. *Congressional Quarterly Inc.* Arifin, Z. (2011). Implementasi Manajemen Stratejik Berbasis Kemitraan Dalam
Sejarah Pariwisata: Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Simanjuntak, B. A., Tanjung, F., & Nasution, R. (2017).
Singgih, M.N., & Nirwana. (2016). Perencanaan Dan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Dengan Model Partisipatory Rural Appraisal
Yogyakarta: Penerbit Gava Media.